

TRAGEDI CHEONAN 2010: DILEMA KEAMANAN ASIA TIMUR

Demeiati Nur Kusumaningrum¹

Abstract

This paper aimed to discuss the crisis on the Korean Peninsula. The 2010 Cheonan tragedy became a momentum for political instability in the East Asia region. Based on the theory of Balance of Threat (BOT), when there is an imbalance of threats (from other countries or coalitions), a country will build an alliance or increase its internal capacity to reduce its vulnerability. Increasing alliances between South Korea and the United States have resulted in a security dilemma of East Asia neighbour countries. It examines the alliance of South Korea-the United States argued as an embodiment of Korea's national interests which must defend itself from a threatening environment. This is influenced by the history and rollercoaster relations with North Korea. In dealing with Cheonan tragedy, Russia supported North Korea by stating that North Korea did not need to be responsible. China abstained from the UN Security Council and was disrupted by US and South Korean military exercises. Meanwhile, Japan is seeking a trilateral agreement to increase security cooperation in East Asia with South Korea and the United States. The U.S. continues to apply economic sanctions and international pressure to bring North Korea back to the negotiation agenda.

Keywords: *Alliance, Cheonan, Korea, Security Dilemma*

Pendahuluan

Secara geografis, Korea terletak di kawasan Asia Timur Laut. Semenanjung Korea diapit oleh 3 (tiga) negara besar, yaitu Jepang, Cina, dan Rusia. Sama halnya dengan Israel yang berada di tengah kawasan Timur Tengah dan Singapura yang berada di selat Malaka, maka Korea merupakan kawasan yang strategis bagi arsitektur politik internasional. Oleh sebab itu, pada abad ke 19 Amerika Serikat mencoba memberikan pengaruhnya di kawasan Korea (Seung-Yoon & Mas' oed, 2003).

Korea berdiri sebagai sebuah negara yang berbasis kerajaan. Terbentuknya negara Korea Selatan bermula dari kerajaan Choson di Korea bagian Utara yang berdiri pada abad ke- 4 sebelum masehi (dekat perbatasan dengan Cina).

¹ Staf Pengajar di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. Email: demeiati.nk@umm.ac.id

Kemudian pada tahun 300 Masehi, muncul lagi tiga kerajaan secara terpisah di Semenanjung Korea yang menempati wilayah di Utara, Tenggara dan Barat Daya. Lalu pada tahun 668 Masehi dibawah kekuasaan kerajaan Silla, tiga kerajaan yang terpisah di Utara, Tenggara dan Barat Daya akhirnya disatukan. Sejak masa tersebut hingga pertengahan abad ke-20, Korea berkembang sebagai sebuah negara kesatuan di bawah satu sistem administrasi serta mengembangkan bahasa sendiri dengan akar tradisi yang kuat (Oberdorfer, 2001).

Sejarah pendudukan Jepang di Korea berambisi untuk menjadikan Korea sebagai bagian dari wilayah Jepang yang mengemuka dengan kebijakan 'Naesun Ilche' yaitu Jepang dan Chosun adalah satu badan. Mereka menyebut laut antara semenanjung Korea dan Jepang sebagai Danau Jepang. Sama halnya dengan Israel yang berada di tengah kawasan Timur Tengah dan Singapura yang berada di selat Malaka, maka Korea merupakan kawasan yang strategis bagi arsitektur politik internasional. Korea Selatan menjadi saksi sejarah warisan Perang Dingin. Perang Korea berdampak pada perundingan sekutu dan membagi kawasan Semenanjung Korea menjadi dua pemerintahan dengan basis ideologi yang berbeda – Komunisme dan Demokrasi. Terpisahnya Korea Utara dan Korea Selatan menjadi bukti adanya perang ideologi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat (Mas'ood & Seung-Yoon, 2005; Seung-Yoon & Mas'ood, 2003).

Seperti halnya tragedi tenggelamnya kapal cheonan Korea Selatan pada tahun 2010 (Lendon, 2010; Ryall, 2010; Sudworth, 2010).

Pukul 9:22 malam pada 26 Maret, korvet ROK Navy Cheonan tenggelam di Laut Kuning di sebelah selatan Garis Batas Utara yang disengketakan di dekat Pulau Baengnyeong setelah ledakan di buritan kapal merobeknya menjadi dua. Dari 104 pelaut Korea Selatan di kapal, 58 diselamatkan; 46 mati atau tetap hilang. Para ahli dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Swedia telah membantu dalam penyelidikan yang sedang berlangsung. Hampir satu bulan setelah tenggelam, para penyelidik Korea Selatan telah mengkonfirmasi bahwa penyebab ledakan itu adalah eksternal, memicu spekulasi bahwa Cheonan terkena torpedo atau tambang mengambang. Korea Utara membantah terlibat dalam tenggelamnya Cheonan (Cha dalam CSIS, 2010).

Berdasarkan pendapat Victor Cha (CSIS, 2010), penenggelaman kapal Cheonan oleh Korea Utara dianalisis berdasarkan pertimbangan beberapa argumen, 1) Tindakan itu menjadi pembalasan dalam merespon bentrokan di Laut

Barat pada November 2009 yang menyebabkan hilangnya dua nyawa warga Korea Utara; 2) Tindakan itu bisa saja merupakan bentuk diplomasi koersif yang mencoba memaksa pemerintah Korea Selatan yang konservatif dan tidak mau terlibat dalam perundingan di mana Korea Utara akan mendapatkan hibah dan bantuan; 3) Tindakan itu untuk menyombongkan kemampuan angkatan laut Korea Utara dan mendemonstrasikannya kepada Korea Selatan; 4) Mungkin yang paling mengerikan menurut Cha, tindakan itu bisa menjadi manifestasi dari gejolak kepemimpinan internal di Pyongyang dan mengejar kebijakan luar negeri garis keras.

Serangan atas Cheonan ini, yang mengakibatkan kematian 46 kelasi, dituduhkan pada Korea Utara, walaupun bagi China menyatakan tidak ada cukup bukti bahwa kapal itu tenggelam oleh serangan Korea Utara. Menurut analisis LIPI (2010), Korea Utara terprovokasi oleh latihan militer Hoguk yang direncanakan sebagai latihan tahunan angkatan bersenjata Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) pada 28 November 2010. Amerika Serikat menyatakan bahwa latihan bersama angkatan bersenjata AS dan Korea Selatan dilakukan untuk menghalangi Korea Utara melakukan serangan lanjutan atas Korea Selatan. Kapal induk USS George Washington dan empat kapal perang AS lainnya disertai oleh kapal-kapal perang Korea Selatan akan mengikuti latihan itu (LIPI, 2010).

Penyerangan Korea Utara akhir tahun 2010 lalu di Pulau Yeonpyeung terjadi karena kedatangan AS ke Korea Selatan yang mencurigai Korea Utara mengembangkan uranium nuklirnya secara besar-besaran. Jika hal ini terus berlanjut, dikhawatirkan Korea Utara akan menggunakan bom nuklirnya untuk menyerang. AS dan Jepang tetap memberikan dukungan pada Korea Selatan. Selain itu, negara-negara Eropa dan China mengecam penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan. Latihan bersama yang dilakukan AS dan Korea Selatan di wilayah perbatasan Korea Utara dengan menunjukkan kekuatan kapal-kapal perang mereka juga makin meningkatkan intensitas ketegangan konflik tersebut (LIPI, 2010).

Tetapi yang dikhawatirkan banyak pihak yaitu kemampuan rudal nuklir Korea Utara yang memiliki daya jelajah yang tinggi. Sebagai contohnya yaitu peluru kendali SA-2 buatan Soviet yang digunakan Korea Utara memiliki

jangkauan 8 hingga 30 km dan peluru kendali jenis *Samlet* dan *Silkworm* yang memiliki jangkauan hingga 95 km dapat menjangkau wilayah Seoul. Sedangkan, Korea Selatan termasuk dalam negara dengan ekonomi yang maju yang mempunyai militer yang kuat. Dari sisi pertahanan, Korea Selatan mendapat perlindungan dari oleh AS sejak tahun 1953. AS juga menempatkan armada pasukannya di markas Korea Selatan dan *Seventh Fleet* merupakan armada yang terbesar yang masih dipertahankan di sana (LIPI, 2010). Dengan demikian, perkembangan kerjasama Korsel dan A.S. dalam mengatasi agresifitas Korut menjadi pembahasan yang menarik.

Pembahasan

Aliansi dan Pertimbangan Keamanan Nasional

William D. Coplin (2003:15) dalam “Introduction to International Politics: A Theoretical Overview” menyatakan bahwa politik internasional menyangkut seluruh dunia, bukan sekedar hubungan bilateral, melainkan juga menyangkut kondisi-kondisi yang muncul di dalam negara yang mempengaruhi hubungan diantara negara-negara. Sebagai konsekuensinya, penstudi politik internasional harus mampu menganalisis dampak seluruh aktivitas yang berkaitan. Dalam menganalisis politik internasional, penstudi perlu memahami peran sistem ekonomi dalam negeri dan internasional dalam aktifitas politik. Selain itu, penstudi harus memperhitungkan rasionalitas pembuat kebijakan dalam memprediksi tindakan politik luar negeri. Faktor-faktor sosial penting untuk dipelajari sebagai landasan untuk memahami peranan kultur dan proses sosial dalam politik dunia (Coplin, 2003).

Arsitektur politik internasional sangat dinamis dan melibatkan multi-aktor, termasuk masalah konflik, perang, aliansi, dan kerjasama perdagangan. Quincy Wright mengkategorikan permasalahan internasional kedalam tiga level *Tension*, *Conflict* dan *War*. Meski istilah permasalahan memiliki banyak tingkatan dan intepretasi. Konflik menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan dalam melihat kondisi internasional. Seperti halnya pandangan dari kaum realis yang menyatakan bahwasanya tatanan internasional selalu berada pada kondisi anarki dan konflik menurut Morgenthau suatu hal yang wajar sebagai representasi dari

kekuasaan negara. K.J. Holsti menyebutkan bahwa 'pengaruh' adalah instrumen untuk mencapai tujuan. Negara berusaha mempengaruhi pihak lain tidak hanya untuk mencapai kepentingan individu tetapi juga tujuan yang lebih besar seperti prestise, kedaulatan teritorial, tenaga kerja, bahan baku, keamanan, atau aliansi. Hubungan antar negara dalam politik internasional digunakan untuk menganalisis dinamika perilaku, citra / identitas, dan kebijakan negara untuk mengejar kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan negara didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain (Holsti, 1983; Joach Morgenthau, 1948; Wright, 1967).

Aliansi adalah suatu asosiasi formal dari beberapa negara untuk atau dalam hal penggunaan (atau tidak) kekuatan militer dimaksudkan baik untuk keamanan atau memperbesar keanggotaannya, melawan negara (negara-negara) tertentu. Suatu negara dapat meningkatkan kemampuan militernya dengan cara membangun persenjataan atau membentuk aliansi. Metode aliansi sering dianggap lebih disukai karena jauh lebih ekonomis. Aliansi memungkinkan beban pertahanan dibagi dengan anggota aliansi lainnya (Agussalim, 2011). Aliansi merupakan pilihan suatu negara untuk meningkatkan kekuatan relatif dalam menghadapi ancaman yang tidak bisa diatasi oleh kekuatan internal. Stephen Walt dengan teori Balance of Threat (BOT) berpendapat bahwa ketika terjadi ketidakseimbangan ancaman (dari negara atau koalisi negara lain), suatu negara akan membangun aliansi atau meningkatkan kemampuan internal untuk mengurangi kerawanannya (vulnerability). Gabungan kekuatan eksternal dalam aliansi akan mengatasi kelemahan negara tersebut dalam menghadapi ancaman dari negara atau koalisi negara lain (Montratama, 2015).

Dalam penelitian ini, aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat dipahami sebagai pengejawantahan dari kepentingan nasional Korea yang harus mempertahankan diri dari lingkungan yang penuh ancaman. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah dan perkembangan hubungan dengan Korea Utara yang masih pasang-surut. Selain itu, politik keamanan Korea Selatan lebih cenderung menggambarkan dilema keamanan di wilayah Asia Timur. Di mana, Korea Selatan diapit oleh negara-negara besar seperti Cina dan Jepang. *Security*

Dilemma dapat didefinisikan sebagai spiral aksi dan reaksi dibidang keamanan antara satu negara dengan negara lain dalam hal pembangunan persenjataan. Bahwa setiap upaya suatu negara untuk mencapai keamanannya ---utamanya dengan memperkuat kemampuan militernya--- akan memicu perasaan tidak aman bagi negara-negara lain.

Pertama, *security dilemma* terjadi karena sulitnya membangun saling kepercayaan diantara para pembuat keputusan negara-negara di dunia. Sehingga ada pemikiran untuk saling memperkuat diri (national security) dengan meningkatkan kemampuan militer sebagai konsep pertahanan tradisional. Kekuatan militer dapat meningkatkan kepercayaan diri negara di kancah internasional dan sebagai bentuk international pressure untuk menyukseskan negosiasi internasional demi tercapainya kepentingan dalam negeri. Kedua, *security dilemma* terjadi akibat kegagalan komunikasi diplomatik antar pihak. Ada gab komunikasi yang terjadi antara satu negara dengan ideologi tertentu dengan negara lain dengan ideologi yang lain (misalkan Uni Sovyet dengan Sosialis-Komunis dengan Amerika Serikat dengan Demokrasi pada masa Perang Dingin). Hal ini memicu sense of competition demi memperkuat pengaruh masing-masing di dunia internasional.

Ketiga, faktor sejarah atau keadaan kontemporer juga mempengaruhi terjadinya Security Dilemma. Negara yang pernah saling berkonflik/perang di masa lalu memiliki kecenderungan meningkatkan kemampuan militer dalam rangka *deterrence* di masa yang akan datang. Konflik/perang dapat terjadi salah satunya karena adanya sifat kerentanan (*vulnerability*) suatu negara dan dominasi oleh negara lain yang lebih superpower. Sehingga dalam perspektif realis, kekuatan militer dapat mewujudkan 'balance of power' sehingga perang bisa diminimalisir. Meskipun dalam prakteknya, sulit untuk mencapai keseimbangan tersebut. Keempat, *security dilemma* juga terjadi karena fenomena kemajuan teknologi yang menyulitkan penentuan karakter persenjataan; apakah bersifat ofensif atau defensif.

Ketika sebuah negara meningkatkan teknologi persenjataannya, hal ini dapat memicu kecurigaan negara lain. Apakah kekuatan militer itu akan digunakan sebagai bentuk pertahanan atau sengaja sebagai persiapan perang.

Dampak *Security Dilemma* pada keamanan internasional adalah eksistensi perlombaan senjata yang memicu ketegangan dunia dan ancaman terhadap keamanan dunia. Potensi konflik atau perang terbuka semakin meningkat. Jika perang benar-benar terjadi maka potensi korban juga lebih besar. Dengan demikian, aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat cenderung dipengaruhi oleh pencapaian kepentingan Korea Selatan yang menghadapi dilema keamanan.

Metode

Topik ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan menerapkan metodologi hubungan internasional. Objek penelitian adalah kerjasama bilateral Korea Selatan dan Amerika Serikat. Berdasarkan ruang lingkup pembahasan, penelitian ini menggunakan level analisis negara. Aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat sebagai unit analisis. Perkembangan aliansi dalam merespon isu politik keamanan dan politik ekonomi menjadi unit eksplanasi.

Sumber data diperoleh dari telaah pustaka yang berasal dari laporan/publikasi pemerintah Korea Selatan dan Amerika Serikat serta hasil penelitian para pakar dalam jurnal ilmiah yang mengulas tentang politik Korea, kompleksitas kawasan Asia Timur dan isu-isu internasional yang terkait. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur/ analisis teks baik yang berasal dari referensi cetak maupun daring.

Teknik analisis dilakukan melalui 3 tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teknik analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang merujuk pada pendapat Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi sebagai sesuatu yang saling terkait selama pra, proses, dan sesudah pengumpulan data sehingga dalam interaksinya membentuk wacana yang dimaknai sebagai “analisis” (Silalahi, 2009:339).

Reduksi data dimulai dengan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga membentuk kesimpulan-kesimpulan yang bisa diverifikasi. Penyajian data dilakukan dengan menguji temuan hasil reduksi data dengan asumsi-asumsi dasar teori yang digunakan sebagai kerangka analisis. Penarikan kesimpulan merupakan bagian

akhir dari upaya mensinkronisasikan hasil analisis yang telah diuji dengan teori terhadap hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya (Silalahi, 2009).

Dilema Keamanan di Semenanjung Korea

Masyarakat Indonesia mengenal Korea Selatan melalui drama, mode pakaian, dan musik yang populer sebagai – *hallyu wave*. Selain itu, produk-produk industri Korea Selatan membanjiri Indonesia, sebagai contoh Samsung untuk peralatan elektronik sejenis ponsel dan televisi, serta Hyundai dan KIA, untuk jenis kendaraannya. Sebagai negara Asia, Korea Selatan mulai menyusul keunggulan Jepang dan Cina dalam bidang teknologi dan perdagangan.

Korea Utara memiliki kekuatan ekonomi yang baik meski tak sebaik Korea Selatan, yang mana pertahanan militernya bekerjasama dengan China dan Rusia. Pada tahun 2000, diadakan normalisasi hubungan antara Korea Utara dan Rusia yang menyatakan bahwa jika terdapat agresi yang mengancam keamanan maka dapat dilakukan konsultasi dan kerjasama secepatnya. Sementara, Amerika Serikat tetap menyatakan dukungannya untuk mempertahankan keamanan Korea Selatan.

Penyerangan terhadap kapal laut Korea Selatan memicu ketegangan dengan beberapa negara di Asia Timur seperti China. Pemerintah China seolah mendukung Korea Utara dan membiarkan situasi memanas di mana Korea Selatan telah berupaya membangun stabilitas keamanan dengan negara-negara tetangganya. Korsel menganggap agresifitas Korut adalah ancaman bagi kemandirian regional, sementara China dan Korut memandang latihan bersama A.S dan Korsel juga merupakan ancaman yang nyata.

Tragedi tenggelamnya kapal Cheonan di mana Korea Selatan kehilangan 46 nyawa tidak ditanggapi serius oleh pemerintah Korea Utara. Bahkan Korut merasa tidak bertanggungjawab meskipun hasil penyelidikan A.S, Inggris, Australia dan Swedia telah mengumpulkan bukti yang mendukung asumsi pemerintah Korsel. Hal ini yang membuat pemerintah Korsel pada akhirnya menghentikan aktifitas di daerah industri Kaesang hingga Korut menyampaikan permohonan maafnya (BBC, 2015).

Untuk menunjukkan kekuatan Korea Utara mereka setelah kapal perang Cheonan tenggelam, Amerika Serikat dan Korea Selatan menyatakan akan meningkatkan latihan militer bersama di Laut Kuning. Hal ini merupakan respon dari provokasi yang dilakukan Korut dengan menenggelamkan kapal Cheonan. Korsel juga kecewa dengan pernyataan Dewan Keamanan PBB yang mengutuk tragedi tersebut namun tidak menyatakan bahwa Korut harus bertanggungjawab. Dokumen PBB hanya merekomendasikan bahwa Korsel perlu bekerjasama dengan A.S. untuk menangani krisis di Semenanjung Korea dan meninggalkan upaya rekonsiliasi dengan Korut. China juga abstain menanggapi protes Korsel. Seperti yang diketahui bersama, pemerintah China tidak bisa melepaskan kepentingan politik dan ekonomi terhadap Semenanjung Korea. Dukungan China terhadap Korut menjadi kekuatan tersendiri untuk membuat Korut tetap melakukan uji coba nuklir, di tengah sanksi ekonomi dan tekanan AS untuk kembali pada perundingan pelucutan senjata (Hancock, 2010; Kessler, 2010).

Namun, China tidak setuju dengan kesepakatan Korsel dan A.S. tersebut. Menurut beberapa media, China menjadi waspada sejak tiga kapal selam A.S. datang membawa rudal Tomahawk. Hal ini mengganggu ketenangan pemerintah China. Bahkan sentimen publik di China mulai meningkat. Masyarakat menyamakan latihan bersama AS dan Korsel di Laut Kuning dengan kunjungan mantan PM Koizumi Junichiro ke Kuil Yasukuni sebagai hal yang sama-sama menjatuhkan harga diri dan martabat pemerintah China. Dalam merespon protes pemerintah China, Juru bicara Departemen Luar Negeri Korea Selatan, Kim Young-sun mengatakan,

"Latihan Laut Barat adalah masalah yang sedang dibahas antara dua sekutu, Korea dan AS, sebagai respon terhadap serangan Korea Utara terhadap Cheonan. Kami akan membuat penilaian sendiri dan memutuskan untuk mengambil tindakan berdasarkan penilaian seperti itu. " Dia mengatakan pemerintah "yakin bahwa pemerintah China juga memahami sifat latihan bersama." Namun, secara pribadi, beberapa pejabat pemerintah merasa Cina melampaui batas dengan dukungannya untuk Korea Utara di Dewan Keamanan PBB dan protes terhadap latihan itu (Hancock, 2010).

Agresifitas Korut terhadap Korsel melalui tragedi Cheonan pada akhirnya menarik ketegangan Cina terhadap A.S. China memandang latihan angkatan laut

gabungan oleh pasukan Korea Selatan dan AS di perairan Korea sebagai upaya mengadakan pertandingan perang di halaman depan China. Selain itu, Korea Utara mengatakan bahwa aliansi A.S dan Korsel mengancam perang di semenanjung. Korea Utara ingin menunjukkan aliansi eratnya dengan Cina, sementara Korea Utara juga berusaha menegaskan kembali pengaruhnya di semenanjung. Sikap Cina tersebut menggambarkan realisasi dari politik luar negerinya ‘*Heping Jueqi*’ – ‘Peaceful Rise’ atau "kebangkitan yang damai" yang pertama kali diperkenalkan oleh Zheng Bijian, mantan wakil kepala sekolah Central Party School, dalam pidatonya di Forum Boao untuk Asia di Pulau Hainan pada tahun 2003. Hal ini ditegaskan kembali oleh Perdana Menteri Cina, Wen Jiabao selama kunjungannya ke Amerika Serikat pada bulan Oktober 2003. Presiden Hu Jintao kemudian menyatakan dalam pertemuan Biro Politik Pusat partai bahwa Cina akan mempertahankan prinsip-prinsip diplomatik "kebangkitan dan kemandirian yang damai." Pada Forum Boao bulan April 2004, Hu Jintao memperkenalkan politik luar negerinya tersebut untuk mencegah persepsi bahwa perkembangan Cina merupakan sebuah ancaman. Terdapat tiga prinsip sebagai basis politik luar negeri Cina tersebut “睦隣, 安隣, 富隣” yaitu pembangunan hubungan bertetangga yang baik, stabilitas, dan kesejahteraan bersama (Sang-hyun, 2010).

The Global Times sebagai bagian dari publikasi Partai Komunis Cina mengeluarkan survei yang membangun sentimen negatif terhadap aliansi AS dan Korsel. Hasil survei menyatakan pemerintah Cina perlu mengendalikan arogansi Korsel yang berada di belakang perlindungan AS. Laut Cina Timur harus menjadi perhatian yang berkaitan dengan kepentingan teritorial Cina. Surat kabar tersebut juga protes dengan sikap Jepang pada peringatan 100 tahun kolonialisasi Korea yang hanya meminta maaf kepada Korsel namun tidak kepada Cina juga. Adapun Jepang merupakan negara sekutu A.S yang merupakan tetangga terdekat Cina (Sang-hyun, 2010).

Pasca tragedi Cheonan, Cina secara terbuka mengambil sikap konfrontatif. Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) melakukan latihan tembak-menembak di area laut di lepas pantai Shanghai dan Provinsi Zhejiang antara 30 Juni dan 5 Juli 2010, memobilisasi banyak kapal perang dan pejuang untuk menguji

kemampuan perangnya. Media Cina diundang di atas kapal untuk mengirimkan gambar-gambar manuver mereka. Selanjutnya, pada 17-18 Juli 2010, PLA mengadakan latihan berskala besar untuk transportasi dan personel maritim masa perang di lepas pantai Yantai, Provinsi Shandong (Sang-hyun, 2010).

Sementara, Jepang menanggapi serius penenggelaman kapal Cheonan sebagai upaya provokasi Korut di kawasan. PM Hukio Hayotama menyatakan bahwa tragedi ini merupakan sebuah peringatan terhadap aliansi A.S dan Jepang. Pada konferensi pers bersama di Tokyo pada 21 Mei 2010, Menlu Katsuya Okada menyatakan perlunya peningkatan aliansi Jepang-AS. Insiden Cheonan juga menjadi momentum untuk peningkatan kerjasama keamanan antara Jepang dan Korsel. Kedua pemerintah akan menegosiasikan perjanjian tentang berbagi data intelijen, akuisisi, dan pelayanan lintas teritorial sebagai tindakan teknis untuk memperkuat militer di antara kedua pihak. Dengan demikian, kesepakatan trilateral ini diharapkan mampu menanggulangi provokasi Korut dan ketidakstabilan situasi keamanan di kawasan Asia Timur.

Lebih jauh, dalam insiden Cheonan, Rusia juga mengirimkan tim investigasi nasionalnya untuk menyelidiki hal tersebut. Sayangnya, Rusia menolak pernyataan aliansi tim investigasi dari pihak Korsel yang meminta Korut bertanggungjawab. Kehadiran Rusia hanya menjadi penyeimbang kekuatan yang mendukung Cina dan Korut. Hasil investigasi tidak disampaikan oleh pihak Rusia sehingga sama-sama tidak mampu membuat Korsel menerima sikap Korut yang tidak bertanggungjawab (Sang-hyun, 2010; Snyder & Byun, 2011).

Menanggapi sikap keras Korut dan Cina, A.S tidak tinggal diam. Pemerintah AS di bawah pemerintahan Obama hingga Trump, tetap mengupayakan kembalinya Korut dalam perundingan. Pada pemerintahan Trump, A.S mengadakan pertemuan dengan Korut untuk membahas upaya perdamaian dengan tetap menerapkan sanksi ekonomi dan tekanan internasional. Sementara, pemerintah Korsel secara berkelanjutan membangun komunikasi diplomatik dengan Korut. Pemerintah Korsel mendukung Korut menjadi tuan rumah Olimpiade 2023.

Dalam pernyataan bersama dengan Korea Selatan, Korea Utara berjanji untuk "secara permanen membongkar" situs uji coba mesin rudal dan *launchpad*

di Tongchang-ri "di hadapan para ahli dari negara-negara terkait." Itu adalah situs yang sudah dijanjikan untuk ditutup, meskipun mengizinkan inspektur asing ke Korut. Korea Utara juga "menyatakan keinginan untuk terus mengambil langkah lebih lanjut seperti pembongkaran permanen" dari fasilitas nuklir utama Yongbyon, tetapi hanya jika Amerika Serikat mengambil "langkah yang sesuai" yang didasarkan pada kesepakatan Trump dengan Kim pada pertemuan puncak bulan Juni.

Korsel dan Korut menyetujui beberapa langkah untuk meredakan ketegangan di perbatasan paling termiliterisasi di dunia, termasuk pembentukan zona penyangga di dekat garis depan, penangguhan latihan artileri dan manuver lapangan di sana, dan penarikan kembali bersama dari 11 pos penjaga perbatasan pada akhir tahun. Para pemimpin sepakat untuk mendirikan zona penyangga lain di Laut Kuning di mana mereka akan menanggihkan latihan maritim dan menembakkan senjata, serta zona larangan terbang di daerah perbatasan untuk mencegah bentrokan pesawat yang tidak disengaja.

Kesimpulan

Tulisan ini merupakan telaah singkat dari perkembangan hubungan Korsel dan Korut pasca tragedi Cheonan. Mengikuti pembahasan dari berbagai pakar Asia Timur, arsitektur politik semenanjung Korea merupakan warisan Perang Dingin yang melibatkan kontestasi ideologi dan pengaruh kekuatan dari negara-negara besar. Dukungan A.S terhadap kedaulatan teritorial Korsel diwujudkan melalui aliansi militer yang memicu dilema keamanan bagi Korut. Tragedi Cheonan menjadi bukti bahwa latihan militer bersama Korsel dan A.S mengundang ketegangan bagi negara-negara tetangga seperti pemerintah Korut dan Cina.

Dalam situasi tekanan internasional yang berasal dari A.S, tuduhan terhadap penembakan kapal Cheonan merupakan hal yang masuk akal. Selain itu, latihan bersama di dianggap memasuki 'halaman depan' Cina menjadi tindakan yang dianggap menyepelekan pemerintahan Presiden Hu Jin Tao. Korsel yang kurang puas dengan rekomendasi PBB terkait tragedi Cheonan, merasa bahwa pemerintah tidak bisa bersandar pada penyelesaian multilateral. Sehingga, tragedi Cheonan bukan hanya menjadi momentum penguatan kapasitas nasional, tetapi

juga refleksi dari masa depan stabilitas kawasan Asia Timur. Dengan demikian, pemerintah Jepang turut waspada dengan memperkuat kerjasama keamanan dengan Korsel dan A.S.

Daftar Pustaka

- Agussalim, D. (2011). *Pertahanan dan Keamanan Internasional. Military Path to Peace: Alliances and Balance of Power*. Yogyakarta.
- BBC. (2015). North Korea: “No apology” for S Korea Cheonan sinking. *BBC News*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-32013750>
- Coplin, W. D. (2003). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis (Terj.)* (2nd ed.). Bandung: Sinar Baru.
- Hancock, B. (2010). Responding to Cheonan warship sinking, US and South Korea confirm war games. *The Christian Science Monitor*. Retrieved from <https://www.csmonitor.com/World/terrorism-security/2010/0709/Responding-to-Cheonan-warship-sinking-US-and-South-Korea-confirm-war-games>
- Holsti, K. J. (1983). *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis (International Politics)*. Jakarta: Erlangga.
- Joach Morgenthau, H. (1948). *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. New York: McGraw-Hill.
- Kessler, G. (2010). U.S. officials urge measured response in attack on South Korean warship. *The Washington Post*. Retrieved from <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/05/20/AR2010052004336.html>
- Lendon, B. (2010, September 14). S. Korea’s final report affirms Cheonan was sunk by N. Korean torpedo. *CNN*. Retrieved from <http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/09/13/south.korea.cheonan.report/index.html>
- LIPI. (2010). Konflik Korea. Retrieved May 8, 2011, from <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional/359-konflik-korea->
- Mas’oed, M., & Seung-Yoon, Y. (2005). *Memahami Politik Korea* (1st ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Montratama, I. (2015). Strategic Re-Alignment: Alternatif Indonesia dalam Mengimbangi Ancaman Aliansi Five Powers Defense Arrangement (FPDA).

Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 5(1). Retrieved from <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/352/227>

Oberdorfer, D. (2001). *The Two Koreas A Contemporary History* (Revised Ed). United States of America: Basic Books.

Ryall, J. (2010, April 22). South Korean ship sunk by crack squad of “human torpedoes.” *The Telegraph*. Tokyo. Retrieved from <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/southkorea/7619087/South-Korean-ship-sunk-by-crack-squad-of-human-torpedoes.html>

Sang-hyun, L. (2010). South Korea’s Response to the Cheonan Incident and Changing Northeast Asian Situation. *Defense Policy Study*, 26(3). Retrieved from http://koreafocus.or.kr/design2/layout/content_print.asp?group_id=103300

Seung-Yoon, Y., & Mas’oed, M. (2003). *Masyarakat, Politik dan Pemerintahan Korea: Sebuah Pengantar* (1st ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Snyder, S., & Byun, S.-W. (2011). Cheonan and Yeonpyeong: The Northeast Asian Response to North Korea’s Provocations. *The Rusi Journal*, 156(2), 74–81. <https://doi.org/10.1080/03071847.2011.576477>

Sudworth, J. (2010). How South Korean ship was sunk. *BBC News*. Seoul. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/10130909>

Wright, Q. (1967). *Problems of Stability and Progress in International Relations*. Connecticut: Greenwood Press.